



Penyalahgunaan Kewenangan dalam Hubungan Kerja: Perspektif Viktimologi atas Kasus Penggadaian SK Anggota Satpol PP Bogor

Abuse of Authority in Employment Relations: A Victimology Perspective on the Case of Pawning the Decree of a Bogor Satpol PP Member

Arya Samodra¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno
Email: artiasam0@gmail.com¹, hoedyjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history:

Received : 10-05-2026

Revised : 12-05-2026

Accepted : 14-05-2026

Published : 16-05-2026

Abstract

Crime in the bureaucratic workplace does not always take the form of physical violence or conventional fraud, but can also manifest as abuse of authority that exploits hierarchical relationships. One case illustrating this phenomenon is the pawning of decrees (SK) belonging to members of the Public Order Agency (Satpol PP) in Bogor by their superiors. This incident demonstrates a deviation in the working relationship, which should be based on professionalism and responsibility, but is instead exploited for personal gain. This study aims to analyze the victim's position in this case of abuse of authority through a victimology perspective, emphasizing the power relations between superiors and subordinates and the forms of victimization experienced within the organizational structure. The research method used is normative juridical, with a statutory, conceptual, and case-based approach, based on a study of regulations and phenomena occurring in bureaucratic practice. The results indicate that the victim in this case is in a vulnerable position due to structural dependency on their superiors, making it difficult to refuse or report harmful actions. The victimization is not only economic but also includes psychological pressure and uncertainty in the working relationship. Furthermore, this case also indicates weaknesses in the internal oversight system that allowed for abuse of authority. Therefore, a victimology approach is crucial for understanding the dynamics of victims in hierarchical work relationships, as well as for encouraging the strengthening of oversight and employee protection systems within bureaucratic environments. This effort is expected to prevent similar practices and create fairer and more accountable work relationships.

Keywords: *Victimology, Abuse of Authority, Power Relations*

Abstrak

Kejahatan dalam lingkungan kerja birokrasi tidak selalu berbentuk kekerasan fisik atau penipuan konvensional, melainkan dapat muncul dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan yang memanfaatkan relasi hierarkis. Salah satu kasus yang mencerminkan fenomena tersebut adalah penggadaian surat keputusan (SK) milik anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Bogor oleh atasan mereka. Peristiwa ini menunjukkan adanya penyimpangan dalam hubungan kerja yang seharusnya dilandasi oleh profesionalitas dan tanggung jawab, namun justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi korban dalam kasus penyalahgunaan kewenangan tersebut melalui perspektif viktimologi, dengan menitikberatkan pada relasi kuasa antara atasan dan bawahan serta bentuk viktimisasi yang dialami dalam struktur organisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, yang didasarkan pada kajian terhadap regulasi serta fenomena yang terjadi dalam praktik birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban dalam kasus ini berada dalam posisi yang rentan akibat adanya ketergantungan struktural terhadap atasan, sehingga sulit untuk menolak atau melaporkan tindakan yang merugikan. Viktimisasi yang terjadi tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup tekanan psikologis dan ketidakpastian dalam hubungan kerja.



Selain itu, kasus ini juga mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, pendekatan viktimologi menjadi penting untuk memahami dinamika korban dalam relasi kerja yang hierarkis, serta untuk mendorong penguatan sistem pengawasan dan perlindungan terhadap pegawai dalam lingkungan birokrasi. Upaya ini diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik serupa dan menciptakan hubungan kerja yang lebih adil dan akuntabel.

Kata Kunci: Viktimologi, Penyalahgunaan Wewenang, Relasi Kuasa

PENDAHULUAN

Dalam dinamika hubungan kerja di lingkungan birokrasi, struktur organisasi yang bersifat hierarkis menjadi salah satu karakteristik utama yang membedakan hubungan kerja tersebut dari sektor lainnya. Relasi antara atasan dan bawahan tidak hanya dibangun atas dasar pembagian tugas dan tanggung jawab, tetapi juga melibatkan dimensi kekuasaan yang mempengaruhi pola interaksi dalam organisasi. Dalam kondisi ideal, relasi tersebut seharusnya berjalan secara profesional, dengan menjunjung prinsip akuntabilitas dan integritas. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang relasi kekuasaan tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi.

Salah satu bentuk penyimpangan yang mencerminkan fenomena tersebut adalah kasus penggadaian surat keputusan (SK) milik anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Bogor oleh atasan mereka. Berdasarkan pemberitaan, diketahui bahwa terdapat sejumlah SK anggota yang dijadikan jaminan oleh pihak atasan tanpa mekanisme yang sah. Tindakan ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan yang memanfaatkan posisi struktural dalam organisasi untuk memperoleh keuntungan tertentu.

Kasus ini menarik untuk dikaji dalam perspektif viktimologi, karena korban tidak berada dalam posisi yang sepenuhnya bebas untuk menolak atau melaporkan tindakan yang merugikan. Dalam hubungan kerja yang bersifat hierarkis, bawahan sering kali berada dalam kondisi ketergantungan terhadap atasan, baik dalam hal penilaian kinerja, kelangsungan pekerjaan, maupun aspek administratif lainnya. Ketergantungan ini dapat menciptakan tekanan yang bersifat implisit, sehingga korban cenderung tidak memiliki ruang yang cukup untuk melakukan resistensi.

Dalam konteks tersebut, viktimisasi tidak hanya terjadi dalam bentuk kerugian ekonomi, tetapi juga mencakup tekanan psikologis serta ketidakpastian dalam hubungan kerja. Korban dapat mengalami kekhawatiran terhadap konsekuensi yang mungkin timbul apabila menolak atau melaporkan tindakan atasan, sehingga memilih untuk diam atau mengikuti arahan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa viktimisasi dalam kasus ini memiliki dimensi struktural, di mana posisi korban ditentukan oleh sistem relasi kekuasaan yang ada.

Selain itu, kasus ini juga mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal dalam organisasi. Idealnya, mekanisme kontrol dalam birokrasi mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Namun, ketika pengawasan tidak berjalan secara efektif, tindakan yang menyimpang dapat berlangsung tanpa terdeteksi dalam jangka waktu tertentu. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap pegawai tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada efektivitas implementasi dan pengawasan dalam praktik.



Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengkaji kasus penggadaian SK anggota Satpol PP di Bogor melalui pendekatan viktimologi, yang menempatkan korban sebagai fokus analisis. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi korban dalam relasi kerja yang tidak seimbang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya viktimisasi dalam struktur birokrasi. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya penguatan sistem perlindungan terhadap pegawai, khususnya dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang memiliki posisi dominan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk viktimisasi yang dialami anggota Satpol PP sebagai korban dalam kasus penggadaian SK oleh atasan?
2. Bagaimana relasi kuasa antara atasan dan bawahan mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam kasus tersebut?
3. Bagaimana implementasi perlindungan terhadap korban dalam lingkungan kerja birokrasi serta kendala yang dihadapi dalam mencegah praktik serupa?

Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk viktimisasi yang dialami anggota Satpol PP dalam kasus penggadaian SK, baik dari aspek ekonomi, psikologis, maupun struktural.
2. Untuk mengkaji pengaruh relasi kuasa dalam hubungan kerja birokrasi terhadap terjadinya penyalahgunaan kewenangan.
3. Untuk menilai implementasi perlindungan terhadap korban dalam lingkungan kerja birokrasi serta mengidentifikasi kendala dalam upaya pencegahan praktik penyalahgunaan kewenangan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Viktimologi dalam Konteks Relasi Kerja dan Birokrasi

Perkembangan viktimologi tidak hanya terbatas pada kajian korban dalam kejahatan konvensional seperti kekerasan fisik atau kejahatan jalanan, tetapi juga telah meluas ke berbagai konteks sosial, termasuk hubungan kerja dan struktur birokrasi. Dalam konteks ini, viktimologi berupaya memahami bagaimana seseorang dapat menjadi korban dalam situasi yang secara formal tampak sebagai hubungan profesional, tetapi pada praktiknya mengandung ketimpangan kekuasaan yang signifikan.

Dalam lingkungan birokrasi, relasi kerja dibangun dalam struktur hierarkis yang jelas, di mana atasan memiliki kewenangan dalam mengatur, mengawasi, serta mengevaluasi kinerja bawahan. Struktur ini pada dasarnya diperlukan untuk menjamin efektivitas organisasi. Namun, dalam kondisi tertentu, struktur tersebut juga dapat menciptakan potensi penyalahgunaan kewenangan apabila tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang memadai.



Dari perspektif viktimologi, korban dalam relasi kerja sering kali tidak terlihat secara eksplisit, karena hubungan antara pelaku dan korban berlangsung dalam kerangka formal yang sah. Oleh karena itu, penting untuk melihat tidak hanya pada tindakan yang dilakukan, tetapi juga pada konteks relasi yang memungkinkan terjadinya tindakan tersebut.

2. Konsep Penyalahgunaan Kekuasaan (*Abuse of Power*)

Penyalahgunaan kekuasaan merupakan konsep penting dalam memahami kejahatan yang terjadi dalam struktur organisasi. Dalam konteks ini, kekuasaan tidak hanya dipahami sebagai otoritas formal, tetapi juga sebagai kemampuan untuk mempengaruhi tindakan orang lain melalui posisi yang dimiliki.

Abuse of power terjadi ketika individu yang memiliki kewenangan menggunakan posisinya untuk tujuan yang menyimpang dari fungsi yang seharusnya. Dalam lingkungan birokrasi, bentuk penyalahgunaan ini dapat muncul dalam berbagai praktik, termasuk tekanan terhadap bawahan, pemanfaatan fasilitas organisasi untuk kepentingan pribadi, hingga tindakan yang merugikan secara langsung pihak lain dalam struktur tersebut.

Dalam kasus penggadaian SK anggota Satpol PP, penyalahgunaan kekuasaan terlihat dari pemanfaatan posisi atasan untuk mengakses dan menggunakan dokumen penting milik bawahan. Tindakan ini menunjukkan bahwa kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan organisasi justru dialihkan untuk kepentingan pribadi.

Dari sudut pandang viktimologi, penyalahgunaan kekuasaan memiliki karakteristik yang khas, yaitu korban berada dalam posisi yang sulit untuk menolak karena adanya ketergantungan terhadap pelaku. Hal ini membedakan kejahatan jenis ini dari kejahatan lain yang terjadi dalam hubungan yang lebih setara.

3. Korban dalam Struktur Hierarkis (*Structural Victimization*)

Dalam kajian viktimologi, dikenal konsep viktimisasi struktural, yaitu kondisi di mana seseorang menjadi korban akibat posisi yang ditempatinya dalam suatu struktur sosial atau organisasi. Dalam kasus seperti ini, kerentanan korban tidak hanya disebabkan oleh tindakan pelaku, tetapi juga oleh sistem yang memungkinkan terjadinya tindakan tersebut.

Dalam struktur birokrasi, bawahan berada dalam posisi yang secara inheren lebih lemah dibandingkan atasan. Ketergantungan terhadap atasan dalam hal pekerjaan, penilaian kinerja, serta kelangsungan karier menciptakan kondisi di mana bawahan memiliki ruang terbatas untuk menolak atau melaporkan tindakan yang merugikan.

Viktimisasi struktural ini sering kali tidak disadari secara langsung oleh korban, karena tindakan yang dilakukan pelaku dapat dibungkus dalam bentuk instruksi atau kebijakan internal. Akibatnya, korban dapat merasa bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti arahan yang diberikan, meskipun tindakan tersebut merugikan.

Dalam konteks ini, viktimologi berperan untuk mengungkap bahwa posisi korban bukan semata-mata akibat kelemahan individu, tetapi juga akibat ketimpangan yang terdapat dalam struktur organisasi.



4. Dampak Viktimisasi dalam Lingkungan Kerja

Viktimisasi dalam lingkungan kerja memiliki dampak yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga psikologis dan profesional. Dari sisi ekonomi, korban dapat mengalami kerugian langsung akibat tindakan pelaku. Namun, dampak yang tidak kalah penting adalah tekanan psikologis yang timbul akibat relasi kerja yang tidak sehat.

Korban dalam situasi ini dapat mengalami kecemasan, ketidakpastian, serta rasa takut terhadap konsekuensi yang mungkin timbul apabila mereka menolak atau melaporkan tindakan pelaku. Kondisi ini dapat mempengaruhi kinerja, motivasi kerja, serta kesejahteraan mental korban.

Selain itu, dalam jangka panjang, viktimisasi juga dapat berdampak pada lingkungan organisasi secara keseluruhan. Praktik penyalahgunaan kewenangan yang tidak ditangani dengan baik dapat menurunkan kepercayaan terhadap sistem, serta menciptakan budaya kerja yang tidak sehat.

5. Perlindungan Korban dalam Lingkungan Birokrasi

Secara normatif, perlindungan terhadap pegawai dalam lingkungan kerja telah diatur dalam berbagai ketentuan hukum dan peraturan internal. Prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, serta perlindungan terhadap penyalahgunaan kewenangan menjadi dasar dalam menciptakan lingkungan kerja yang adil.

Namun, dalam praktiknya, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah adanya ketimpangan kekuasaan yang membuat korban enggan untuk melaporkan tindakan yang merugikan. Selain itu, mekanisme pengaduan yang belum sepenuhnya efektif juga menjadi faktor yang memperlemah perlindungan terhadap korban.

Dalam konteks ini, pendekatan viktimologi menekankan pentingnya menciptakan sistem yang tidak hanya mampu menindak pelaku, tetapi juga memberikan ruang yang aman bagi korban untuk melaporkan dan mendapatkan perlindungan. Hal ini mencakup penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan transparansi, serta perlindungan terhadap korban dari potensi tekanan atau intimidasi.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta relevansinya dalam menjelaskan fenomena yang terjadi dalam praktik. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis perlindungan terhadap korban dalam kasus penyalahgunaan kewenangan, khususnya dalam hubungan kerja yang bersifat hierarkis di lingkungan birokrasi.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yang saling melengkapi, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana, penyalahgunaan kewenangan, serta perlindungan terhadap



korban. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami dasar hukum yang mengatur hubungan kerja dalam birokrasi serta batasan-batasan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat atau atasan.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep viktimologi yang relevan, seperti viktimisasi struktural, relasi kuasa, serta penyalahgunaan kewenangan dalam organisasi. Pendekatan konseptual memberikan landasan teoritis dalam menganalisis posisi korban dalam hubungan kerja yang tidak seimbang.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji kasus penggadaian SK anggota Satpol PP di Bogor sebagai objek analisis. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat memahami bagaimana penyalahgunaan kewenangan terjadi dalam praktik, serta bagaimana respons yang diberikan oleh sistem hukum dan institusi terkait.

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan
- 3) Ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi:

- 1) Buku-buku yang membahas hukum pidana, viktimologi, dan hukum administrasi
- 2) Jurnal ilmiah yang membahas relasi kuasa dalam organisasi dan perlindungan korban
- 3) Artikel ilmiah yang relevan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam birokrasi

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi:

- 1) Kamus hukum
- 2) Ensiklopedia hukum
- 3) Referensi lain yang mendukung pemahaman konsep

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data kasus yang diperoleh dari pemberitaan media yang kredibel untuk memahami kronologi serta konteks penggadaian SK anggota Satpol PP.



3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui:

- a. Identifikasi regulasi yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan
- b. Pengkajian literatur viktimologi dan relasi kerja dalam birokrasi
- c. Pengumpulan informasi faktual terkait kasus dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap aspek normatif dan konseptual dari permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menafsirkan data secara sistematis untuk memahami keterkaitan antara norma hukum dengan realitas yang terjadi.

Tahapan analisis meliputi:

1. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data berdasarkan jenis dan relevansinya
2. Interpretasi data, yaitu penafsiran terhadap data yang telah dikumpulkan
3. Penarikan kesimpulan, yaitu perumusan hasil analisis secara logis dan sistematis

Dalam proses analisis, data normatif akan dikaitkan dengan kondisi faktual dalam kasus penggadaian SK anggota Satpol PP, sehingga menghasilkan analisis yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kasus penggadaian surat keputusan (SK) anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Bogor merupakan peristiwa yang menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam lingkungan kerja birokrasi. Berdasarkan pemberitaan, diketahui bahwa terdapat sejumlah SK anggota yang digadaikan oleh pihak atasan, dengan total mencapai 14 dokumen. SK tersebut merupakan dokumen penting yang berkaitan dengan status kepegawaian anggota, sehingga memiliki nilai administratif yang signifikan.

Dalam praktiknya, tindakan penggadaian tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang sah dan tidak sesuai dengan fungsi dari dokumen tersebut. SK sebagai bukti legalitas kepegawaian seharusnya tidak digunakan sebagai jaminan dalam transaksi pribadi. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi dokumen dari kepentingan administratif menjadi alat untuk memenuhi kepentingan individu tertentu.

Dari sisi korban, anggota Satpol PP yang SK-nya digadaikan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mereka tidak hanya kehilangan kontrol atas dokumen penting milik mereka, tetapi juga berpotensi menghadapi risiko administratif yang dapat mempengaruhi status kepegawaian.



Selain itu, korban juga berada dalam posisi yang sulit untuk menolak atau mempertanyakan tindakan tersebut, mengingat pelaku merupakan atasan dalam struktur organisasi.

Dampak yang timbul tidak hanya bersifat ekonomi atau administratif, tetapi juga mencakup aspek psikologis. Korban dapat mengalami tekanan akibat ketidakpastian yang muncul terkait penggunaan dokumen mereka, serta kekhawatiran terhadap konsekuensi yang mungkin timbul dalam hubungan kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa kerugian yang dialami tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga non-materiil.

Dari sisi penanganan, kasus ini kemudian terungkap melalui proses pemeriksaan internal dan pemberitaan media. Aparat terkait melakukan penelusuran terhadap praktik tersebut untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab. Namun demikian, informasi yang tersedia menunjukkan bahwa persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan tindakan individu, tetapi juga mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal yang memungkinkan praktik tersebut terjadi.

Pembahasan

1. Bentuk Viktimisasi dalam Kasus Penggadaian SK

Viktimisasi yang dialami anggota Satpol PP dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai viktimisasi yang bersifat struktural dan tidak langsung terlihat secara eksplisit. Korban tidak mengalami kekerasan fisik, tetapi mengalami kerugian akibat penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki posisi lebih tinggi dalam organisasi.

Bentuk viktimisasi yang muncul dapat dilihat dalam beberapa aspek. Pertama, dari sisi administratif, korban kehilangan kendali atas dokumen penting yang berkaitan dengan status kepegawaian mereka. Hal ini menimbulkan risiko yang dapat berdampak pada aspek pekerjaan, termasuk kemungkinan terhambatnya proses administrasi tertentu.

Kedua, dari sisi psikologis, korban berada dalam kondisi tekanan akibat relasi kerja yang tidak seimbang. Ketergantungan terhadap atasan membuat korban cenderung tidak memiliki ruang untuk menolak atau mempertanyakan tindakan tersebut. Kondisi ini menciptakan bentuk tekanan yang bersifat implisit, yang dalam viktimologi sering kali sulit diidentifikasi secara langsung.

Ketiga, dari sisi struktural, viktimisasi terjadi karena posisi korban dalam organisasi yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan tindakan yang merugikan. Dengan demikian, viktimisasi dalam kasus ini tidak hanya disebabkan oleh tindakan individu, tetapi juga oleh kondisi sistem yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

2. Relasi Kuasa dalam Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang

Relasi kuasa antara atasan dan bawahan memiliki peran yang sangat signifikan dalam memungkinkan terjadinya praktik penggadaian SK. Dalam struktur birokrasi, atasan memiliki otoritas yang mencakup pengawasan, penilaian kinerja, serta pengambilan keputusan yang berdampak pada bawahan.

Kondisi ini menciptakan ketimpangan dalam hubungan kerja, di mana bawahan berada dalam posisi yang lebih lemah. Ketimpangan tersebut tidak selalu dimanfaatkan secara negatif, namun dalam kasus ini, terlihat bahwa posisi tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.



Relasi kuasa yang tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol yang efektif dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan. Bawahan yang bergantung pada atasan cenderung menghindari konflik, sehingga tidak melakukan perlawanan terhadap tindakan yang merugikan. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam kasus ini tidak dapat dilepaskan dari struktur relasi kerja yang ada.

3. Perlindungan Korban dan Kendala dalam Lingkungan Birokrasi

Perlindungan terhadap korban dalam kasus ini masih menghadapi berbagai kendala. Secara normatif, terdapat aturan yang melarang penyalahgunaan kewenangan serta memberikan perlindungan terhadap pegawai. Namun dalam praktiknya, implementasi perlindungan tersebut belum berjalan secara optimal.

Salah satu kendala utama adalah adanya hambatan dalam pelaporan. Korban yang berada dalam posisi bawahan sering kali merasa ragu untuk melaporkan tindakan atasan, karena adanya kekhawatiran terhadap dampak yang mungkin timbul, seperti tekanan dalam pekerjaan atau penilaian kinerja yang tidak objektif.

Selain itu, sistem pengawasan internal yang belum efektif juga menjadi faktor yang memungkinkan terjadinya praktik tersebut. Pengawasan yang lemah membuat tindakan penyalahgunaan kewenangan tidak segera terdeteksi, sehingga dapat berlangsung dalam jangka waktu tertentu.

Di sisi lain, mekanisme perlindungan terhadap korban belum sepenuhnya memberikan jaminan keamanan bagi pelapor. Hal ini menyebabkan korban cenderung memilih untuk tidak mengambil tindakan, meskipun mengalami kerugian.

Dengan demikian, perlindungan korban dalam lingkungan birokrasi memerlukan penguatan tidak hanya dari sisi regulasi, tetapi juga dari sisi implementasi, termasuk dalam menciptakan sistem pelaporan yang aman dan efektif.

4. Kegagalan Sistem Pengawasan Internal sebagai Faktor Kriminogenik

Kasus ini juga menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan tidak terjadi secara terisolasi, melainkan berkaitan erat dengan kegagalan sistem pengawasan internal dalam organisasi. Dalam birokrasi, seharusnya terdapat mekanisme kontrol yang mampu mencegah tindakan penyimpangan, seperti audit, supervisi, atau sistem pelaporan.

Namun, fakta bahwa penggadaian SK dapat terjadi pada lebih dari satu korban menunjukkan bahwa praktik tersebut berlangsung dalam periode tertentu tanpa terdeteksi secara cepat. Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan yang ada belum berjalan secara efektif.

Dalam perspektif kriminologi dan viktimologi, kondisi ini dapat disebut sebagai faktor kriminogenik struktural, yaitu kondisi dalam sistem yang secara tidak langsung membuka peluang terjadinya kejahatan. Artinya, pelaku tidak hanya bertindak karena faktor individu, tetapi juga karena adanya celah dalam sistem yang memungkinkan tindakan tersebut dilakukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kasus penggadaian surat keputusan (SK) anggota Satpol PP di Bogor merupakan bentuk



penyalahgunaan kewenangan yang terjadi dalam relasi kerja yang bersifat hierarkis. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga menunjukkan adanya penyimpangan dalam penggunaan otoritas yang seharusnya dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab.

Dari perspektif viktimologi, anggota Satpol PP yang SK-nya digadaikan dapat dikategorikan sebagai korban dalam posisi struktural yang rentan. Viktimisasi yang dialami tidak hanya terbatas pada aspek administratif atau ekonomi, tetapi juga mencakup tekanan psikologis yang timbul akibat ketimpangan relasi kuasa antara atasan dan bawahan. Ketergantungan bawahan terhadap atasan dalam sistem birokrasi menciptakan kondisi di mana korban memiliki keterbatasan dalam menolak atau melaporkan tindakan yang merugikan.

Lebih lanjut, kasus ini menunjukkan bahwa relasi kuasa dalam struktur birokrasi memiliki peran signifikan dalam memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Ketidakseimbangan posisi antara atasan dan bawahan, yang tidak diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif, menjadi faktor yang memperbesar risiko terjadinya viktimisasi.

Dari sisi perlindungan korban, meskipun secara normatif terdapat ketentuan yang melarang penyalahgunaan kewenangan dan memberikan perlindungan terhadap pegawai, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan dalam pelaporan, lemahnya sistem pengawasan internal, serta belum optimalnya perlindungan terhadap pelapor menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan tersebut.

Dengan demikian, diperlukan penguatan sistem perlindungan dalam lingkungan birokrasi yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga pada pencegahan melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme pengawasan yang lebih efektif. Dalam perspektif viktimologi, pendekatan yang berorientasi pada korban menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap individu dalam struktur organisasi memiliki perlindungan yang memadai dari praktik penyalahgunaan kewenangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2016). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arif Gosita. (2004). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Detik.com. (2024). *Terungkap, Total 14 SK Anggota Satpol PP Bogor yang Digadai Atasan*.
- Lilik Mulyadi. (2018). *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*. Bandung: Mandar Maju.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Soerjono Soekanto. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.